

INTEREST SINGLE DIGIT (Target dua tahun Pemerintahan Jokowi-JK)

**Oleh:
Ferinton Mahmud**

*Komputerisasi Akuntansi, Politeknik LP3I Jakarta
Gedung Sentra Kramat Jl. Kramat Raya No. 7-9 Jakarta Pusat 10450
Telp. 021 – 31904598 Fax. 021 - 31904599*

Email : fuserikson17@gmail.com

ABSTRACT

iSingle Digit is one number before comma in loan interest rate which belongs to Indonesian Government. This program relates to some matters such as reducing LPS guaranteed deposit rate, BI rate, operational costs, and NPL. Loan collectibility influenced NPL in some categories Current, Special Mention, Substandard, Doubtful, Loss. These loan collectibility categories are being used to calculate Activa Productive, and CAR. If the collectibility is getting lower, a bank will have to allocate more funds with BI as the Activa Productive increase. This condition has negative impacts on intermediary function of a bank. Percentage of bank industries in July 2015 and July 2016 (yoy) for CAR were 20.78% and 23.19%; NIM 5.59% and 5.32%; LDR 5.32% and 5.59%; NPL 2.95% and 3.22%.

BI rate decreased from 7.75 bps to 5.75 bps in October 2016, meanwhile loan interest rate was 13.8% which was still higher than government target. This fact meant that change in loan interest rate was not really influenced by the decreasing BI rate.

Every less digit of loan interest rate has positive impact to business and economy. Stakeholders such as society, government, OJK, BI, LPS and banking industry must be involved to decreasing loan rate more effectively. The effectiveness of this policy would be at stake if it only considers one aspect of stakeholders.

The complex and highly regulated condition of banking industry based on its past performance would determine the loan interest rate established. Reduction of loan interest rate could be more efficient by decreasing spread between bank's deposit rate and BI rate.

Money Market and Capital Market affected the role of banking industry negatively in its efforts to implementing the monetary policy. Capital market instruments such as SUN of 5 year period offering 7% – 8% coupon has made the disparity between the coupon and bank deposit rate wide enough to cause cash flow out of the banks.

Nowadays, Bank is in the right time to do some efforts to increasing their efficiency. Monetary authority controls inflation so that the inflation would be lower, that means positive to banking industry.

Bank as a business institution has profit orientation to get have trust from its stakeholders. It must be careful in decreasing loan interest rate even though BI rate has already decreased. In contrary, if BI rate increased bank should increase loan interest rate while managing the debtor risks. The bank can use strategy by decreasing transaction costs and NPL or known as $5C + 4P + 3R$.

In October 2016, ratio of loan taken from deposit was 90.19%. This situation indicated that banking industry had limitation to expand to other productive sectors. Ironically, bank loans focused more on long term financing with higher risks such as infrastructure and plantation that cannot be profitable in short term.

iSingle Digit policy can be used to solve bank's internal and external problems. This policy can work effectively only if regulation and efficiency of banking industry has been improved.

In many countries, banking industry failure to run their intermediary function has caused monetary crisis. Every stakeholder must cooperate each other to help bank running their intermediary function, so that iSingle Digit policy can work effectively and in balance to support Indonesia economy sectors.

iSingle digit

iSingle digit adalah *interest Single Digit* merupakan suku bunga perbankan satu angka didepan koma yang menjadi salah satu program pemerintah hingga akhir tahun ini masih saja menghadapi sejumlah kendala. Langkah awal berupa pemangkasan suku bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (*BI Rate*) belum sepenuhnya membantu target program *iSingle Digit*. Sepanjang tahun 2016 berjalan, suku bunga acuan Bank Indonesia (*BI Rate*) sudah menurun dari 7,75 *basis points (bps)* menjadi 5,75 *basis points (bps)* terjadi penurunan sekitar 200 persen, walaupun demikian penurunan suku bunga pinjaman hanya turun rata-rata sekitar 100 persen dari rata-rata tingkat suku bunga pinjaman rata-rata sekitar 15,9 persen menjadi 13,8 persen.

Bank Indonesia sebagai Bank Central yang menjadi regulator industri perbankan di Indonesia bertujuan memelihara kestabilan nilai rupiah, dimana untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia antara lain bertugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dengan cara antara lain seperti menentukan tingkat suku bunga acuan (*BI Rate*). *BI Rate* ditentukan Bank Indonesia dengan berdasarkan analisa komprehensif terhadap perekonomian global, pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran, nilai tukar, inflasi, sistem keuangan.

Data terakhir awal bulan Oktober 2016 memberikan indikasi bahwa rata-rata suku bunga pinjaman adalah sekitar 13,8 persen dengan demikian target pemerintah untuk bunga pinjaman *single digit* masih jauh

untuk dicapai. Fakta ini menjadi indikasi bahwa perubahan suku bunga kredit tidak terjadi secara sempurna. Perubahan *BI Rate* sebagai suku bunga acuan tidak terlalu berpengaruh secara proporsional terhadap suku bunga pinjaman.

Kompleksitas dan kekakuan dari industri perbankan dalam memperhitungkan tingkat suku bunga pinjaman yang selalu melakukan *blending* terhadap seluruh fasilitas pinjaman yang telah dikurcurkan dengan klasifikasi kolektibilitas pinjaman yang dalam hal ini dapat diartikan bahwa industri perbankan ,memandang *past performance* dari kredit sangat menentukan dalam perhitungan bunga kredit yang kemudian diproyeksikan menjadi peluang masa depan.

Tingkat suku bunga pinjaman selain sangat dipengaruhi *BI Rate* juga dipengaruhi biaya operasional (*operational cost*) dan portofolio pinjaman bermasalah (Non Performing Loan-NPL) yang berhubungan erat dengan kolektibilitas pinjaman. Kolektibilitas pinjaman dalam industri perbankan merupakan status pinjaman yang meliputi Lancar (*Current*) pinjaman belum ada tunggakan, Dalam Perhatian Khusus (*Special Mantion*) dengan masa tunggakan pinjaman 1 sampai dengan 90 hari, Kurang Lancar (*Substandard*) dengan masa tunggakan pinjaman 91 sampai 120 hari, Diragukan (*Doubtful*) dengan masa tunggakan pinjaman 121-180 hari, Macet (*Loss*) dengan masa tunggakan pinjaman 181 hari lebih. Kategori kolektibilitas kredit dipakai sebagai dasar dalam Perhitungan Pencadangan Aktiva Produktip (PPAP) dan *Capital Adequancy Ratio (CAR)*. Sebagai ilustrasi risiko tidak tertagih dari debitor dengan kolektibilitas

Macet (*Loss*) tentunya lebih besar daripada debitur dengan kolektibilitas Diragukan (*Doubtful*), sehingga presentase PPAP debitur Macet (*Loss*) lebih besar daripada debitur Diragukan (*Doubtful*). Kecenderungan semakin banyak pinjaman dengan kolektibilitas turun menjadi Diragukan (*Doubtful*) dan Macet (*Loss*) terutama disektor perkebunan (*plantation*) dan pertambangan (*minning*) yang mendapat fasilitas pinjaman super jumbo dari perbankan dengan ambang toleransi melebihi 3 persen. Dengan demikian perbankan harus melakukan Perhitungan Pencadangan Aktiva Produktif (PPAP) leabih besar dengan menaikkan dana cadangan kerugian penurunan nilai yang disimpan di Bank Indonersia. Sehingga dana segar (*fresh money*) menumpuk di Bank Indonesia tidak beredar (*money cyrculation*). Kondisi ini tentunya sangat fungsi bank sebagai intermediasi (*intermediary*) sebagai jembatan pihak pemilik dana yang berlebihan dengan pihak yang membutuhkan dana. Sebagai gambaran dibawah ini diinformasikan tentang rasio-rasio kinerja industri perbankan dalam persentase untuk dua periode Juli 2015 dan Juli 2016 sebagai berikut :

	Juli 2016	Juli 2015
Rasio Kecukupan Modal (CAR)	23,19	20,78
Return on Assets (RoA)	2,35	2,27
Rasio Operasional (BOPO)	81,37	81,39
Rasio Bunga Bersih (NIM)	5,59	5,32
Loan to Deposit Ratio (LDR)	90,18	88,50
Rasio Kredit Semat (NPL)	3,22	2,95
Ratio Likuiditas	16,34	17,03

Sumber : : Litbang BI (diolah)

Peranan *Stakeholher* terhadap *iSingle Digit*

Seluruh komponen *stakeholder* hendaknya tidak hanya mementingkan kepentingan masing-masing yang bersifat jangka pendek, tetap hendaklah mendahulukan kepentingan bersama untuk membangun perekonomian yang kokoh dan kuat serta mandiri bangsa Indonesia khususnya dan membangun bangsa Indonesia seutuhnya secara umum.

Perubahan tingkat suku bunga pinjaman sangat diharapkan para pelaku usaha disebabkan setiap digit perubaham suku bunga kredit akan berdampak positif pada dunia usaha dan sendi-sendi kehidupan perekonomian masyarakat. Akselerasi perubahan dengan menurunkan suku bunga pinjaman harus dilakukan dengan menyeluruh dengan melibatkan semua *stakeholder* yang merupakan seluruh pihak berkepentingan meliputi masyarakat, pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan seluruh komponen industri perbankan. Sudut pandang penyelesaian dari satu aspek sangat tidak efektif bahkan menjadi suatu kebijakan yang tidak bermanfaat.

Dari aspek industri perbankan, langkah penurunan suku bunga pinjaman bisa dimulai dengan efisiensi dengan cara menurunkan *spread* yang merupakan selisih antara suku bunga pinjaman (*lending*) dan suku bunga simpanan (*funding*) tanpa harus didorong terlebih dahulu oleh penurunan suku bunga acuan (*BI Rate*).

Peran perbankan yang lamban dalam transmisi percepatan kebijakan moneter tidak bisa dilepas dari kinerja pasar keuangan lain seperti Pasar Uang (*Money Market*) dan Pasar Modal (*Capital Market*). Pasar Modal (*Capital Market*) menawarkan Surat Utang Negara (SUN) dengan tenor 5 tahun dan suku bunga kupon 7 % hingga 8%. Pada Pasa Modal (*Capital Market*) selisih antara suku bunga kupon dan deposito cukup material bagi keluarnya dana dari perbankan.

Upaya peningkatan efisiensi industri perbankan sedang berada pada momen yang tepat. Secara makro, pergerakan laju inflasi berada dalam kendali penuh otoritas moneter yang dapat diartikan laju tahap inflasi sudah dalam tahap terkendali menurun dengan dampak suku bunga riil yang dinikmati industri perbankan menjadi kenyataan.

Perbankan sebagai lembaga bisnis yang menjual kepercayaan (*trusted*) dan

berorientasi mencari laba (*profit oriented*) cenderung bermain aman (*safety*) dan hati-hati (*prudent*) tidak terburu-buru menurunkan suku bunga pinjaman walaupun *BI Rate* telah turun. Sebaliknya apabila *BI Rate* naik, perbankan dengan segera menyesuaikan dengan menaikkan tingkat suku bunga pinjaman. *Behavior banking* yang menjadi semacam *konvensional wisdom* demikian sangat sangat sempurna dan simetris dalam menjamin mekanisme percepatan kebijakan moneter dapat berjalan.

Regulator dan pemerintah diharapkan sangat berperan untuk menekan suku bunga pinjaman menjadi satu digit menjadi terwujud melalui pengelolaan risiko debitur yang dikenal dengan 5 C + 4 P + 3 R. 5C terdiri dari Character merupakan watak dari calon debitur, Capacity merupakan kemampuan menjalankan usaha, Capital adalah kemampuan keuangan dan modal, Collateral merupakan jaminan yang dapat diikat, Condition merupakan keadaan ekonomi calon debitur. 4 P terdiri dari dari Purpose adalah tujuan penggunaan pinjaman yang diberikan, Personality adalah data atau keadaan pribadi, Prospect adalah harapan atau proyeksi dimasa yang akan datang, Payment adalah pembayaran kembali pinjaman. Konsep 3 R terdiri dari RePayment adalah penilaian pembayaran kembali pinjaman, ReTurn adalah penilaian hasil yang dicapai, Risk adalah penilaian risiko pinjaman. Melakukan mitigasi terhadap calon debitur dengan teori 5C+4P+3R sangat potensial untuk menekan biaya transaksi dan pinjaman yang bermasalah (*Non Performing Loan*).

Target iSingle Digit

Penarikan dan pengumpulan dana dari masyarakat (*funding*) dengan memberikan berbagai imbalan suku bunga simpanan secara maksimum telah memberikan dana secara maksimum dalam sistem perbankan. Namun demikian perbankan mengalami kekeringan likuiditas disebabkan sejumlah dana besar

dicairkan untuk melunasi amnesti pajak (*Tax Amnesty*).

Sebagai jalan keluar kesulitan likuiditas, perbankan harus mencari langsung sumber dana dalam jangka pendek di pasar uang (*money market*) dan sumber dana langsung jangka panjang di pasar modal (*capital market*). Pasar Uang (*Money Market*) adalah tempat melakukan transaksi dalam rangka memperoleh dana antara pemilik dana dengan yang butuh dana tanpa harus bertemu langsung dengan menggunakan instrumen jangka pendek kurang dari satu tahun seperti *Commercial Paper*, *Interbank Call Money*, *Banker's Acceptance*, *Commercial Paper*, *Treasury Bills*, *Repurchase Agreement*, *Foreign Exchange Market*.

Pasar Modal (*Capital Market*) adalah tempat melakukan transaksi dalam rangka memperoleh dana antara pemilik dana dengan yang membutuhkan dana tanpa harus bertemu langsung dengan menggunakan instrumen jangka panjang lebih dari satu tahun seperti saham (*stocks*) dan obligasi (*bonds*).

Sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun industri perbankan sebagian besar telah tersalur menjadi pinjaman. Sampai dengan Oktober 2016, ratio pinjaman terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai 90,19 persen yang dapat menjadi indikasi bahwa ruang gerak perbankan untuk ekspansi pinjaman ke sekto-sektor produktif yang lain menjadi terbatas.

Tabel berikut memberikan informasi Kinerja Bank Umum dari Januari – Oktober 2016 dalam Triliun Rupiah :

	Dana Pihak Ketiga	Kredit Yang Diberikan
Januari	4.385.924	4.014.594
Februari	4.437.515	3.998.090
Maret	4.468.955	4.029.924
April	4.478.409	4.035.929
Mei	4.508.452	4.100.342
Juni	4.574.671	4.200.214
Juli	4.585.381	4.161.193
Agustus	4.616.130	4.177.313
September	4.734.231	4.268.209
Oktober	4.856.654	4.349.890

Sumber : Litbang BI (diolah)

Ironisnya dalam keterbatasan ruang gerak perbankan, sebagian besar dana pinjaman perbankan terserap dibidang yang berisiko tinggi (*high Risk*) dengan spektrum jangka panjang (*long term spectrum*) yang antara lain pembiayaan proyek infrastruktur dan perkebunan. Dimana pembiayaan proyek-proyek tersebut tidak menghasilkan uang secara cepat dalam jangka pendek (*short term*).

Dalam industri perbankan secara umum berlaku juga hukum alam *High Risk High Return, Low Risk Low Return*. Prilaku demikian menjamin kerja mekanisme transmisi kebijakan moneter, apabila belum tercapai keseimbangan akan terjadi kesenjangan antara sektor moneter dan sektor riil. Sehingga pergerakan sektor keuangan tidak diikuti penyerapan pinjaman di sektor riil.

Penurunan tingkat suku bunga pinjaman menjadi satu digit (*iSingle Digit*) menghadapi kendala-kendala eksternal dan internal industri perbankan. Agar penurunan suku bunga menjadi satu digit (*iSingle Digit*) dapat tercapai dengan membenahi regulasi perbankan dan efisiensi industri perbankan.

Kegagalan fungsi intermediasi (*intermediary*) dalam industri perbankan pada berbagai negara menjadi salah satu faktor penyebab krisis ekonomi terjadi sudah banyak terjadi yang merupakan bukti empiris dari kegagalan fungsi intermediasi (*intermediary*) perbankan. Sehingga seluruh *stakeholder* harus dapat bersinergy menjalankan fungsi bank sebagai intermediasi (*intermediary*) agar tercapai keseimbangan tingkat suku bunga dalam mencapai tingkat suku bunga pinjaman satu digit didepan koma (*iSingle Digit*) pada sektor riil sesuai target pemerintah.

Multinational Financial Management,

Alan C. Shapiro, Prentice Hall, New York, 2014

Banking Systems, Center For Financial Training, South Western, USA, 2010.

<http://www.bi.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

Bank dan Lembaga Keuangan, Kasmir,
RajaGrafindo, 2015